

**PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Study Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Emia Sri Kirana



**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE EFFECT OF PAD, DAU, DAK ON INDEX DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL BUDGET ALLOCATION AS AN INTERVENING VARIABLE

(Empirical Study in the District / City of Lampung Province)

ABSTRACT

BY

EMIA SRI KIRANA

This study aims to demonstrate empirically the effect of PAD, DAU and DAK to the Human Development Index (HDI) to the Capital Expenditure Budget Allocation (PABM) as an intervening variable. The sample in this study consisted of 12 districts and 2 cities of the 15 districts / cities in Lampung Province during the period 2010-2014, obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS). The analysis used linear regression equation with two models. The first model to test the effect of PAD, DAU and DAK against PABM, while the second model to test the effect PABM IPM. Statistical test results of the first model shows that the PAD, DAU and DAK positively affect PABM. Statistical test results of the second model shows that PABM positively affect the HDI. Rated R square in this study for the first model of 82.39% and 97.58% for the second model.

Urut Abjad: PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, the Human Development Index

ABSTRAK

PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Study Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)

Oleh

EMIA SRI KIRANA

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) sebagai variabel intervening. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung selama periode 2010-2014, yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis yang digunakan adalah regresi linier dengan dua model persamaan. Model pertama menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PABM, sedangkan model kedua menguji pengaruh PABM terhadap IPM. Hasil uji statistik dari model pertama menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK positif mempengaruhi PABM. Hasil uji statistik dari model kedua menunjukkan bahwa PABM positif mempengaruhi IPM. Nilai R square dalam penelitian ini untuk model pertama sebesar 82,39 % dan 97,58 % untuk model kedua.

Urut Abjad : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia

**PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Study Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)

Oleh

EMIA SRI KIRANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Study Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Emia Sri Kirana**

No. Pokok Mahasiswa : **1211021044**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.

NIP 19611209 198803 1 003

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

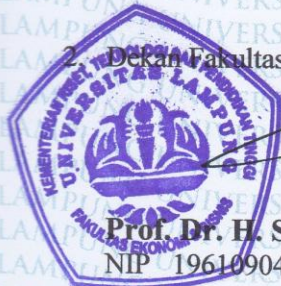
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. 

Penguji I : Dr. Marselina Muchtar, S.E., M.P.M. 

Penguji II : Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Maret 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM

"Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Bandar Lampung, 10 Februari 2017

Penulis



Emia Sri Kirana

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 06 Mei 1994, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari Bapak Basita Sebayang dan Ibu Pelita Br Ginting.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Sepang Jaya pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 20 Bandar Lampung tahun 2009, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur tertulis. Penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Direktorat Jendral Anggaran, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2014. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 selama 60 hari di Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan
Amsal 1:7

Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Yesaya 40:29

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Amsal 3:5

Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan.
Robert F. Kennedy

Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusia-lah yang gagal untuk merancang.
William J. Siegel

Karena hidup hanya satu kali, berikan yang terbaik.
anonim

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang yang luar biasa besar pengorbanannya bagi hidupku, tanpa kasih sayang, doa dan perjuangan kalian saya mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak Basita Sebayang dan mamak Pelita br Ginting yang sangat besar kesabarannya. Terima kasih atas penyertaan dan doa yang senantiasa di panjatkan untuk saya, sehingga tiap proses yang saya jalani terasa ringan dan menjadi lebih baik. Terima kasih atas nasihat, kasih sayang, pengorbanan dan dorongannya. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu wujud bakti dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Untuk adik-adikku Yessi Kristiani br Sebayang, Natalia Margaretha br Sebayang dan Vico Alexandro Sebayang terima kasih atas segala dukungannya selama ini.

Almamater tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih karunia dan anugerahnya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*" dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Satria Bangsawan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E.,M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat untuk Penulis.

5. Bapak M. Husaini, S.E., M.E.P. selaku dosen penguji sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya kepada dosen-dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
7. Staf Administrasi dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung umumnya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, bapak, mamak dan adik-adik yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyanggah gelar Sarjana Ekonomi.
9. Reynold Andika Sembiring yang telah membantu mengerjakan dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat terbaik selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Richa Susyanthi, Nuryani, Dwi Sarasati, Dwi Kurniasari yang selalu membantu penulis dalam suka maupun duka dalam mengerjakan tugas dan skripsi. Terimakasih untuk kebersamaan, saran, motivasi dan bantuannya selama ini.
11. Kance jajan dan galau Yessy Yolanda Sarah Tarigan dan Hendire S Barus. Terimakasih kance untuk waktu dan uang yang dibuang sia-sia karena kebodohan kita, semoga di masa yang akan datang kita tidak boti lagi.

12. Teman sejak kecil Cyntia Surabina Perangin-angin, Elfina Mertasari Sebayang dan Artalia Tarigan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar cepat wisuda.
13. Teman-teman seperjuangan selama KKN di desa Mercu Buana Kec. Way Kenanga Tulang Bawang Barat, Dita Putriana, Tota Gadis Silaban, Dewi Aniatul Fatimah, Muhaqiqin, Arman Sukmanegara dan Arie Rekza Cahya selama 40 hari bersama dan masih berhubungan baik sampai saat ini. Semoga komunikasi kita tetap terjaga sampai selamanya.
14. Teman-teman pejuang skripsi Gagari Alfiyunita Surbakti, Oktanina Sembiring, Bayu Adonia Sembiring, Berlian Sinulingga, Efranisa Ginting, Ina Febrina Ginting, Janwira Adi Putra Sembiring, Juliandi Sinuhaji, Infantri Sembiring, Steven Siregar.
15. Abang, kakak dan adik-adik di PERMATA GBKP Rg Bandar Lampung dan IMKA Rudang Mayang Lampung Bang Eko Aprilnando sinulingga, Bang Ricky Fahlevi Sinulingga, Bang Adri Rinaldo Ginting, Hisa Audrina Ginting, Hosinta Surbakti, Rachel Junita Sitepu, Rinaldo Jupen Pinem, Oren Basta Perangim-angin, Mayditha Apulina Sinulingga, Agus Yohanesta Karo-Karo, Kristu Barus, Novenna Sebayang, Desi Natalia karo-karo, Diah Tarigan, Virgin Sitorus, Median Ginting dan teman-teman lainnya yang tidak dapat di tulis satu per satu.
16. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, Putri Puspita sari, Lorentina, Dewi A, Intan Larasati, Frendy, Elvera Aulia, Kadek, Mamet, Habibi, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkat dan kasih karunia kepada kita semua. Penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak.

Bandar Lampung, 18 Februari 2017
Penulis,

Emia Sri Kirana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Hipotesis Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Anggaran Daerah Sektor Publik	11
2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	12
3. Pendapatan Asli Daerah	13
4. Dana Perimbangan	19
5. Belanja Modal	23
6. Indeks Pembangunan Manusia	26
B. Penelitian Terdahulu	27
III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Ruang Lingkup Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Batasan Variabel	32
E. Alat Analisis	34
F. Metode Analisis	34
G. Analisis Data Panel	35
1. Estimasi Model Panel	35
2. Langkah Penentuan Model Panel	37
H. Uji Hipotesis	39
1. Uji-F (Uji Simultan)	39
2. Uji-t (Uji Individual)	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Objek Penelitian	42
B. Pemilihan Metode Estimasi	45

1. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal	45
2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM.....	46
C. Hasil Analisis Regresi Model Fixed Effect	48
D. Karakteristik Gambaran Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung	50
E. Uji Hipotesis	52
1. Uji t	52
2. Uji F	54
F. Interpretasi Hasil Analisis.....	54
V. SIMPULAN DAN SARAN	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR

Gambar	Halaman
1. Perkembangan Penerimaan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	4
2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2010-2014	5
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2011-2014	6
4. Perkembangan IPM, 2009-2013	44

DAFTAR

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2010-2014.....	5
2. Hasil Uji Chow Regresi Pertama	45
3. Hasil Uji Chow Regresi Kedua.....	46
4. Hasil Uji Hausman Regresi Pertama.....	47
5. Hasil Uji Hausman Regresi Kedua	47
6. Nilai Koefisien <i>Fixed effect</i> Regresi Pertama di Kabupaten/Kota.....	48
7. Nilai Koefisien <i>Fixed effect</i> Regresi Kedua di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	49
8. Nilai Koefisien <i>Fixed effect</i>	50
9. Hasil Uji t-Statistik Variabel Pendapatan Asli Daerah	51
10. Hasil Uji t-Statistik Variabel Dana Alokasi Umum	52
11. Hasil Uji t-Statistik Variabel Dana Alokasi Khusus	52
12. Hasil Uji Signifikansi Regresi Pertama	53
13. Hasil Uji Signifikansi Regresi Kedua	53

DAFTAR

Lampiran	Halaman
1. Data Regresi Pertama	L1
2. Data Regresi Kedua	L2
3. Hasil Estimasi Regresi Pertama Model <i>Pooled Least Square</i> (<i>Common Effect</i>)	L3
4. Hasil Estimasi Regresi Kedua Model <i>Pooled Least Square</i> (<i>Common Effect</i>).....	L4
5. Hasil Estimasi Regresi Pertama Model Pendekatan Efek Tetap (<i>Fix Effect</i>).....	L5
6. Hasil Estimasi Regresi Kedua Model Pendekatan Efek Tetap (<i>Fix Effect</i>).....	L6
7. Hasil Estimasi Regresi Pertama uji chow	L7
8. Hasil Estimasi Regresi Kedua uji chow.....	L8
9. Hasil Estimasi Regresi Pertama Pendekatan Efek Acak (<i>Random effect</i>).....	L9
10. Hasil Estimasi Regresi Kedua Pendekatan Efek Acak (<i>Random effect</i>)	L10
11. Hasil Estimasi Regresi Pertama Uji Hausman	L11
12. Hasil Estimasi Regresi Kedua Uji Hausman	L12
13. Cara Pengujian Chow Pada Data Panel Dengan Eviews 6	L13
14. Cara Pengujian Chow Pada Data Panel Dengan Eviews 6	L14

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah otonom berdasarkan pada asas otonomi daerah. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pembagian kewenangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki sumber pendapatan yang cukup.

Pemerintah daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga diharapkan masing-masing

daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar (Lanjouw, dkk, 2001). Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Brata (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa distribusi pendapatan adalah determinan paling

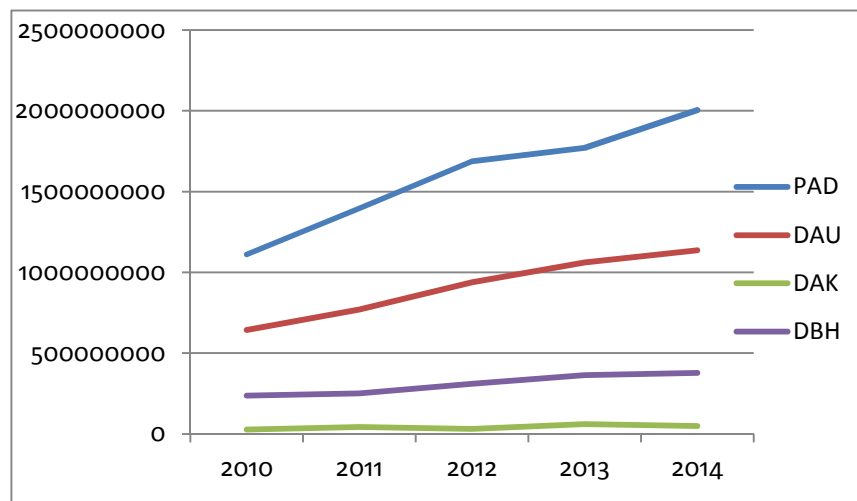
berperan dalam pembangunan manusia di Indonesia, di samping determinan pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah perempuan. Ranis dan Stewart (2002), menyatakan hal yang sama kecuali adanya tambahan determinan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Brata (2005), menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan-determinan pembangunan manusia di Indonesia. Investasi sebagai penentu pembangunan manusia dipertegas oleh Ranis dan Stewart (2002), di samping determinan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin.

Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009). Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator IPM, pemerintah daerah harus berusaha untuk merencanakan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pro rakyat. Daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya yang diperoleh untuk merencanakan target-target capaian kinerja melalui pengeluaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan pengeluaran daerah dapat terlaksana dengan baik jika pendapatan daerah yang diperoleh dapat mendukung. Ada beberapa sumber pendapatan daerah, yaitu yang diperoleh dari daerah itu sendiri dan diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

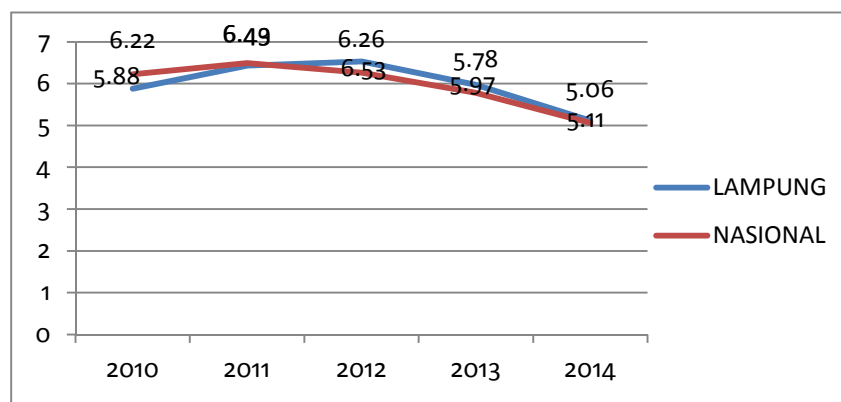
Data pada Gambar 1 adanya peningkatan penerimaan di Provinsi Lampung dari tahun 2010 sampai 2014. Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang konsekuensinya meningkatkan pembangunan manusia.

Tabel 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Lampung	5,88	6,43	6,53	5,97	5,11
Nasional	6,22	6,49	6,26	5,78	5,06

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Gambar 2, bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada periode tahun 2010- 2014 adalah 6,0 persen, sejalan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional periode tersebut. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mencapai 5,11 persen, melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06 persen.

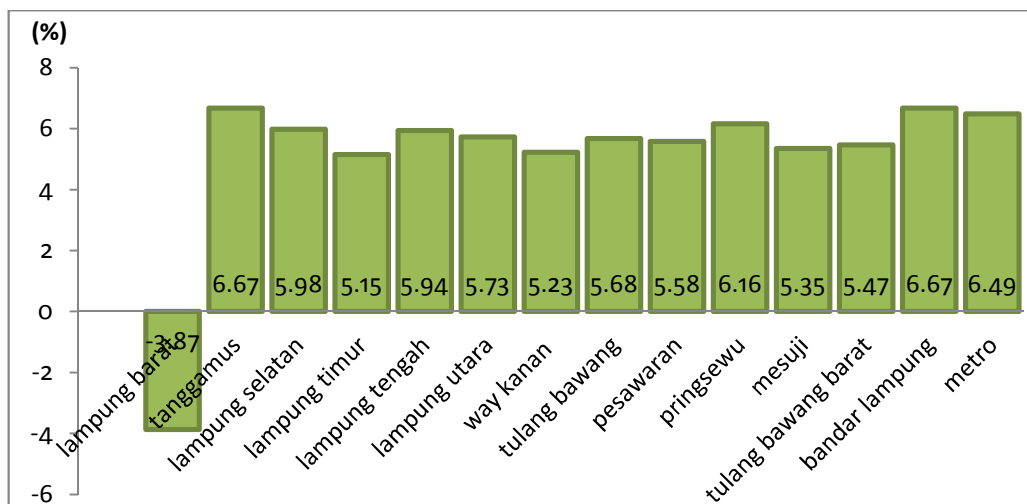


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014

Rata-rata pertumbuhan ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2014 mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dengan rata-rata 5,16 persen ini lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 6,0 persen. Daerah yang mengalami rata –rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kota

Bandar Lampung dengan rata-rata 6,67 persen, sementara Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang laju pertumbuhan ekonominya paling rendah karena dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yaitu sebesar -3,87 persen.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, data diolah

Gambar 3. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2011-2014

Penelitian ini di 14 Kab/Kota di Provinsi Lampung yang seharusnya terdapat 15 Kab/Kota. Pesisir Barat merupakan satu kabupaten yang tidak terdapat dalam penelitian ini dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten baru di Provinsi Lampung sehingga data yang diperlukan tidak tersedia.

Penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal telah dilakukan oleh (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah kabupaten dan kota se Jawa Bali dari tahun 2004 sampai 2005. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan

PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berbeda dengan penelitian Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Herianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD. Hal ini menunjukkan indikasi kuat bahwa belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh DAU. Penelitian yang dilakukan oleh Kintamani (2008) yang menganalisis Indeks Pembangunan Manusia diatur oleh empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar gabungan (APK), dan *Purchasing Power Parity* (PPP), hasil yang mempengaruhi IPM adalah AHH. Indonesia masuk dalam kelompok IPM menengah, artinya mempunyai nilai IPM diantara 0,51 sampai 0,79. Nilai IPM Indonesia adalah 0,684 pada tahun 2013, terdapat pergerakan ke atas yang tidak jauh dari tahun sebelumnya, yaitu 0,681. Untuk kawasan ASEAN, nilai IPM Indonesia jauh berada di bawah Malaysia yang sudah mencapai 77,3. Peringkat Indonesia di ASEAN di posisi lima, Malaysia di posisi tiga dan paling atas ada Singapura. Indonesia masih lebih baik dari Vietnam dan Kamboja (VOA Indonesia).

Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), belanja modal dan kualitas pembangunan manusia telah diteliti oleh Christy dan Adi (2009). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijadikan proxy untuk kualitas pembangunan manusia. Sampel yang digunakan 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada

periode tahun 2004 sampai tahun 2006. Hasilnya menunjukkan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan belanja modal juga berpengaruh terhadap IPM.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Nuarisa (2013) terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian ulang, namun tidak menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas namun diganti dengan PAD, DAU, dan DAK. Dengan demikian, peneliti menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan menjadikan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel penghubung.

Alasan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel penghubung karena DAU, DAK, dan PAD dapat memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya IPM melalui alokasi belanja modal. Menurut Mardiasmo (2002), bahwa dalam era otonomi, pemerintah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan. Dengan meningkatkan penerimaan daerah maka diharapkan kualitas pembangunan manusia juga meningkat.

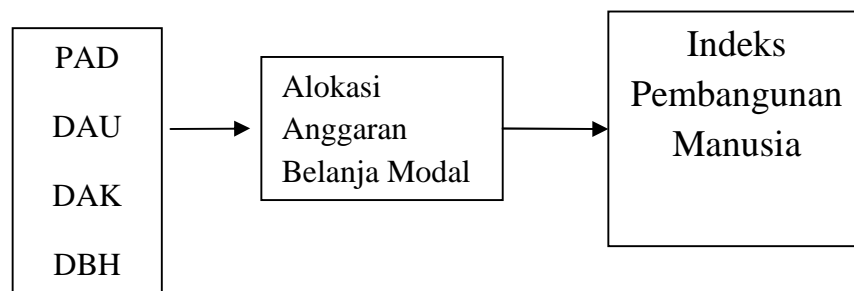
B. Rumusan Masalah

Adakah pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

D. Kerangka Pemikiran



Sumber: diadaptasi dari jurnal Lilis dan Yohana (2012)

Secara sistematis kerangka pemikiran tentang pengaruh DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Penelitian ini difokuskan pada pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Semakin tinggi DAU, DAK dan PAD akan meningkatkan belanja modal, dengan tingginya belanja modal pembangunan sarana dan prasarana fisik akan terlaksana sehingga dengan tersedianya pelayanan masyarakat yang memadai akan berpengaruh terhadap IPM.

Pengalokasian anggaran belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan kualitas manusia diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja

modal ini dapat berupa pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah, sehingga kemajuan dalam pendidikan juga akan meningkatkan kualitas pembangunan.

Investasi Modal Manusia (*Human Capital Investment*) merupakan suatu nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri setiap tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan (Scultz, 1961). Terminologi pembangunan manusia adalah proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya (*Human Development Index Report*, 2001). Pendapatan merupakan salah satu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak.

E. Hipotesis Penelitian

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
4. Diduga Pengalokasian Anggaran Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Daerah Sektor Publik

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “ APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diartikan sebagai sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Berbagai definisi dari para ahli dan undang-undang mengenai APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2006).

Menurut PP RI Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Secara umum sumber pendapatan daerah otonom adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang terdiri atas, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terdiri Dari Hibah, Dana Darurat, Dana Otonomi Khusus, serta bantuan dari provinsi atau daerah lain, penerimaan pembangunan sebagai komponen yang bersumber dari pinjaman pemerintah daerah, dana sektoral, jenis dana ini tidak dimuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah namun masih merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah.

2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Pengelolaan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian di amandemen menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholders sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di pemerintah daerah, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA kemudian diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasikan dalam RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dalam pembahasan anggaran.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan yang dicapai melalui bargaining dengan acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawaban diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- Pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan

yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). Klasifikasi PAD adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak (Halim, 2004). Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota antara lain adalah (Kadjatmiko, 2002):

- Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.
- Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- Pajak reklame adalah yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan.
- Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan bahan galian golongan C oleh orang pribadi maupun badan.
- Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah (Halim, 2004). Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
- Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko, 2002).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yaitu:

- Retribusi pelayanan kesehatan,
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
- Retribusi pergantian biaya cetak KTP,
- Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil,
- Retribusi pelayanan pemakaman,
- Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
- Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,
- Retribusi pelayanan pasar,
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran,
- Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- Retribusi pengujian kapal perikanan,
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
- Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,

- Retribusi jasa usaha terminal,
- Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
- Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
- Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,
- Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
- Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal,
- Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga,
- Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,
- Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
- Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
- Retribusi izin mendirikan bangunan,
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- Retribusi izin gangguan,
- Retribusi izin trayek.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004).

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut (Halim, 2004):

- Bagian laba perusahaan milik daerah,
- Bagian laba lembaga keuangan bank,
- Bagian laba lembaga keuangan non bank,

- Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

d. Lain- Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah.”

4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 2, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus

menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

a. Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak dan SDA

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari:

- Pajak
 - PBB;
 - BPHTB;
 - PPh WPOPND dan PPh Pasal 21

- Sumber Daya Alam
 - Kehutanan;
 - Pertambangan Umum;
 - Perikanan;
 - Pertambangan Minyak Bumi;
 - Pertambangan Gas Bumi; dan
 - Pertambangan Panas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi DAU belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang

dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
 - Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

5. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Jenis – jenis Belanja Modal

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Kriteria Belanja Modal

- 1) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
- 2) Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri / karakteristik aset lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
- 3) Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau

aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat / aparat penyusun anggaran dan / atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b) b.Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d) Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

B. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh darwanto dan yustikasari (2007) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.” Objek penelitian adalah Kabupaten / Kota di Pulau Jawa . Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tahun 2004-2005. Analisis ini menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh pada belanja modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja modal

berdasarkan PAD dan DAU . Analisis selanjutnya menunjukkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini dan Novita (2013) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripsi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal secara parsial (uji t) dan secara simultan (Uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Penelitian lain yang diteliti oleh Nuarisa (2013) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh PAD, Dau dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.” Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

4. Christy dan Adi (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenali efek dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia HDI). Sampel dari penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah, yang meliputi Realisasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2004-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki efek positif pada Belanja Modal. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum. Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM atau *Human Development Index* (HDI). Hal ini menunjukkan besarnya alokasi belanja modal akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat IPM.
5. Lilis dan Yohana (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi (diwakili oleh PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diwakili oleh Belanja Modal. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 22 kabupaten dan 3 kota se-Jawa Tengah selama 2005-2009. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk model pertama dan regresi linear sederhana untuk model kedua. Hasil uji statistik dari model pertama menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap PABM. Sementara DAU, DAK, PAD positif mempengaruhi PABM. Hasil uji statistik dari model kedua menunjukkan praduga PABM positif mempengaruhi IPM. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya Pertumbuhan Ekonomi yang tidak berpengaruh pada IPM melalui PABM, sementara DAU, DAK, dan PAD mempengaruhi IPM melalui PABM. Nilai R square disesuaikan diperoleh untuk setiap model penelitian dalam model langkah pertama dari 53,5% dan 3,1% untuk model kedua.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya dan diolah dengan metode statistik tertentu.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota yang ada. Satu dari 15 kabupaten yang tidak dipilih yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat tidak masuk dalam ruang lingkup karena kabupaten ini baru dimekarkan pada tahun 2013 sehingga data yang diperlukan dari tahun 2010 tidak ada.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data berbentuk laporan tahunan yang berupa data panel selama 5 tahun, dari tahun 2010-2014 di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang telah disusun dan diterbitkan oleh pihak terkait yaitu dari Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dalam berbagai edisi serta berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis, internet, buku dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Batasan Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM sebagai variabel terikat, PABM sebagai variabel penghubung, dan sebagai variabel bebas DAU, DAK, dan PAD. Batasan atau definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu :
 - a) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;
 - b) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas;
 - c) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat atau disebut juga belanja pembangunan yang berupa pembangunan investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Warsito dan Abdul, 2008). Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2010 - 2014.
4. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Dana alokasi umum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2010 – 2014.
5. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Angka DAK didapatkan dari laporan APBD Provinsi Lampung pada tahun 2010-2014.

E. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini menjelaskan kedudukan variabel-variabel penelitian yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Alat yang digunakan untuk menganalisis model ini adalah *Eviews 6*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel.

F. Metode Analisis

Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di kab/kota Prov. Lampung periode 2010-2014 dengan menggunakan persamaan regresi dalam model yang terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Model Regresi Berganda

$$PAMB_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{1it}$$

Dimana:

$PAMB_{it}$: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

PAD_{it} : Pendapatan Asli Daerah

DAU_{it} : Dana Alokasi Umum

DAK_{it} : Dana Alokasi Khusus

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Slope atau koefisien regresi atau intersep

e_{1it} : Error term

2. Model Regresi Berganda Dengan Variabel penghubung

$$IPM_{it} = \alpha + \delta_1 PAMB_{it} + e_{2it}$$

Dimana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

$PAMB$: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Variabel penghubung)

δ_1 : Slope atau koefisien regresi atau intersep

e_2 : Error term

G. Analisa Data Panel

Data panel (*Pooled data*) merupakan data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas-individu (*cross section*). Analisis panel data adalah subjek dari salah satu bentuk yang cukup aktif dan inovatif dalam literatur ekonometrik. Hal ini dikarenakan metode analisis data panel menyediakan informasi yang cukup akurat untuk perkembangan teknik estimasi dan hasil teori. Analisis dengan menggunakan data panel juga berguna untuk alasan teknis-pragmatis. Dalam sebuah penelitian, terkadang kita menemukan suatu persoalan mengenai ketersediaan data (*data availability*) untuk mewakili variabel yang kita gunakan dalam penelitian dalam kondisi demikian pendekatan data panel dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan. Dengan menggabungkan data *time-series* dan *cross-section* kita mampu menambah jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan treatment apapun terhadap data.

1. Estimasi Model Panel

a) *Model Pooled Least Square (Common Effect)*

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan

perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

b) Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka (*dummy*) yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau Least Square Dummy Variabel atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

c) Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*).

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model *fixed effect* memasukkan *dummy* bertujuan mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal dengan *random effect*. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2013).

2. Langkah Penentuan Model Data Panel

a) Uji Chow

Uji chow test digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* (FE) lebih baik daripada model regresi data panel *common effect* (CE) dengan melihat residual *sum squares* (Green, 2000).

Chow test

RRSS : *Restricted Sum of Square Residual* Yang merupakan nilai *Sum of Square Residual* dari model PLS/*common effect*.

URSS : *Unrestricted Sum of Square Residual* Yang merupakan nilai *Sum of Square Residual* dari model LSDV/*fixedeffect*.

N = Jumlah individu data

T = Panjang waktu data

K = Jumlah variabel independen

Nilai chow test yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel pada numerator sebesar N-1 dan denominator NT-N-K. Nilai F-tabel menggunakan α sebesar 1% dan 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = menerima model *common effect*, jika nilai Chow < F-tabel

H_1 = menerima model *fixed effect*, jika nilai Chow > F-tabel

b) Uji Hausman

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara *fixed effect* atau *random effect*, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman ini didasarkan bahwa penggunaan variabel

dummy dalam metode *fixed effect* dan GLS adalah efisien sedangkan OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya adalah metode OLS efisien dan metode GLS tidak efisien. Karena uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* dan sebaliknya.

Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$W = (f_e - r_e)' [V(f_e) - V(r_e)]^{-1} (f_e - r_e) \sim \chi^2(k)$$

W = estimasi dari matriks kovarian sebenarnya

f_e = estimator dari fem

r_e = estimator dari REM

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen. Perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

H_0 = menggunakan pendekatan *random effect*, jika nilai *Hausman* < nilai *chi-square*

H_1 = menggunakan pendekatan *fixed effect*, jika nilai *Hausman* > nilai *chi-squares*

H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Terdapat tiga jenis pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu dengan uji-F, uji-t, dan uji *goodness of fit* (R^2).

1. Uji-t (Uji Signifikansi Individual)

Uji-t bertujuan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan pengujian ini, dapat diketahui apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat atau tidak. Cara melakukan uji-t mirip dengan uji-F. Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan t tabel. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel terikat.

Berikut adalah perumusan hipotesis dalam uji t-statistik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. $H_0: \beta_1 = 0$ artinya variabel PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
 $H_a: \beta_1 > 0$ artinya variabel PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. $H_0: \beta_1 = 0$ artinya variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Ha: $\beta_1 > 0$ artinya variabel DAU berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

3. H0: $\beta_1 = 0$ artinya variabel DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Ha: $\beta_1 > 0$ artinya variabel DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

4. H0: $\beta_1 = 0$ artinya variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Ha: $\beta_1 > 0$ artinya variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Uji-F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji-F menguji model secara keseluruhan untuk melihat apakah semua koefisien regresi dalam model berbeda dengan 0 (model diterima) atau sama dengan 0 (model tidak diterima). Uji-F dapat dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak ada satu slope regresi yang signifikan secara statistik. Selain dengan

membandingkan F_{hitung} dengan F tabel, terdapat cara yang lebih mudah untuk uji-F yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan p-value yang dihasilkan oleh tabel output aplikasi statistika. Jika nilai p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

v. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD mempengaruhi IPM melalui variabel penghubung Belanja Modal secara positif dan signifikan.
2. DAU mempengaruhi IPM melalui variabel penghubung Belanja Modal secara positif dan signifikan.
3. DAK mempengaruhi IPM melalui variabel penghubung Belanja Modal secara positif dan signifikan.
4. DAK berpengaruh paling signifikan terhadap IPM di antara variabel PAD dan DAU melalui variabel penghubung Belanja Modal.
5. Belanja Modal mempengaruhi IPM secara positif dan signifikan.

B. SARAN

1. Mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh terlebih dana dari pemerintah pusat berupa DAK, dengan membuat program yang sejalan dengan Pemerintah Pusat dan/atau melaksanakan program Pemerintah Pusat di daerah.
2. Mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan sumber daya yang terdapat di Provinsi Lampung dan menganggarkan lebih banyak alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Licolin. 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Boediono. 1988. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE . Yogyakarta.
- Brata, A.G. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Christy, Fhino Andrea Dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Coference UKWMS Surabay, Oktober 10th 2009. Surabaya.
- Darwanto Dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonom, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum(DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Data Dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012, Bappenas.
- Dini, Arwati Dan Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013) Isbn: 979-26-0266-6.
- Ginting, Charisma K.S.,Irsad Lubis, Dan Kasyful Ma- Halli. 2008. *Pembangunan Manusia Di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, Vol. 04, No. 01, Wahana Hijau.
- Greene, W.H. 2000, "*Econometrics Analysis*" 3th edition. Prentice Hall. New Jersy.
- Gujarati, Domar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Abdullah Syukriy. 2006. *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2 November. Jakarta.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Jawa Dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Harianto, David Dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Jhingan, ML 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kadmatmiko. 2002. *Dinamika Sumber Keuangan Bagi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah* Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal Sebagai Upaya Memberdayakan Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Kintamani, Ida. 2008. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)*. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, No 072, Tahun Ke-14. 2008.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Kuznets, Simon. 1971. *Economics Growth of Nations*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. *Poverty, Education And Health In Indonesia: Who Benefits From Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.
- Maiharyanti, Eva. 2010. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mankiw, N. Greorgy. 2000. *Teori Makor Ekonomi. Edisi Keempat*. Alih Bahasa : Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Supaya Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Jakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Jurnal ISSN 2252-6765.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Ranis, Gustav And Stewart Frances. 2002. *Economic Growth And Human Development In Latin America*. Cepal No. 78. The UN Economic Commission For Latin America And The Caribbean (ECLAC).
- Ranis, Gustav And Stewart Frances. 2005. *Dynamic Links Between The Economy And Human Development*. DESA Working Paper No. 8. Washington D.C.
- Sari, Putri Puspita. 2016. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2001-2014*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Schultz, Theodore, W .1961. Investment in Human Capital. The American Economics Review.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Prestasi Vol. 9 No. 1 - Juni 2012 ISSN 1411 – 1497.
- Simanjuntak, Robert. 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah Di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization And Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. 2004. *Human Development Report*. United Nations Development Programme. New York.
- Wandira, Arbie Gugus.2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Warsito Kawendar, Abdul Rohman, Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah Dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
- www.djpk.depkeu.go.id. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).
- Www.Voaindonesia.Com/Content/Undp-Indeks-Pembangunan-Indonesia-Naik/1624179.Html